



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LAKIP TAHUN 2019

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas-tugas pemerintahan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 dapat rampung dan diselesaikan.

LAKIP ini disusun sebagai perwujudan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi terkait pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar yang telah dilakukan selama tahun 2019 sekaligus sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi untuk maksud tersebut diatas maka diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan hasil tersebut diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019 yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rancangan tahun 2019 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar, tidak terlepas dari kerja sama semua pihak baik dalam perumusan program kegiatan, maupun dalam implementasi dan pelaksanaan pengawasannya.

Kami sadari dalam penyusunan laporan ini, masih jauh dari kata sempurna dan belum sesuai dengan yang diharapkan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan umpan balik (feedback) baik berupa saran maupun masukan dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk masa yang akan datang dapat lebih baik atau sempurna lagi.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP ini sehingga dapat diselesaikan.

Polewali, 19 Februari 2020

KEPALA DINAS PMD

H. AZWAR JASIN, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19730711 199203 1 001

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	3
BAB II Perencanaan Kinerja	8
A. Rencana Strategis	8
B. Penetapan Kinerja Tahun 2019	10
BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	12
A. Akuntabilitas Kinerja	12
B. Akuntabilitas Keuangan	63
BAB IV Penutup	65

BAB I

PENDAHULUAN

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Asas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung di dalam Perpres tersebut menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selain menyusun RENSTRA untuk masa lima tahun, diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Untuk mengatasi tantangan, perkemangan dan tuntutan masyarakat mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar untuk mempersiapkan diri tetao eksis dalam proses pembangunan perbaikan dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi.

Maksud menyusun rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai dokumen resmi yang dipersyaratkan bagi SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai pedoman dasar melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

A. Latar Belakang

Sejalan dengan dasar pola dan struktur organisasi yang baru, struktur organisasi dan nomenklatur baru dengan peraturan dasar Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja termasuk Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa dengan menyusun dasar/pedoman pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung program Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, yang diaplikasikan melalui program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang harus dipertanggungjawabkan sebagai tolak ukur capaian kinerja yang merupakan penjabaran rencana strategis sebagai bentuk pelaksanaan keuangan.

B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan

Adapun dasar hukum penyusunan LAKIP antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lemaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2009-2014.

8. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
9. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas pokok dan fungsi Perangkat Organisasi Inspektorat BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
10. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009-2014.
11. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
13. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019.
14. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019

C. Maksud dan Tujuan Pelaporan

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dari penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 dimaksud untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab. Adapun tujuannya adalah sebagai wujud pertanggungjawaban DPMD dan untuk mengetahui kemampuan DPMD dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Organisasi.

D. Sistematika Penyajian

Adapun sistematika penyajian LAKIP saat ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan menguraikan gambaran umum organisasi dan sekilas informasi pengantar lainnya.

Bab II Perencanaan dan perjanjian kinerja, menguraikan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja menguraikan pencapaian sasaran dengan pengungkapan dan penyajian kinerja.

Bab IV Penutup

E. Kondisi Organisasi

Kondisi Kelembagaan

Tujuan Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : membantu bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten dalam lingkup pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa
 1. Seksi Penataan dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan
 2. Seksi Perencanaan Pembangunan Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
- d. Bidang Pemerintahan Desa
 1. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kerja Sama Desa
 2. Seksi Penataan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- e. Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pendetayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
 1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
 2. Seksi Pendetayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

SEKRETARIAT DINAS

Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
- d. Penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
- f. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;

- g. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- h. Penyelenggaraan administrasi pelaporan;
- i. Penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
- j. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, SubBagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- c. Pengendalian administrasi keuangan;
- d. Pengendalian perbendaharaan;
- e. Pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
- f. Pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
- g. Pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan
- h. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
- i. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
- j. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- k. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;

- l. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
- m. Pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- n. Pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengendalian administrasi ketatausahaan;
- d. Pengendalian pengelolaan perlengkapan;
- e. Pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan;
- f. Pengendalian administrasi barang;
- g. Pengendalian pengelolaan informasi publik;
- h. Pengendalian pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan;
- i. Pengendalian administrasi kepegawaian;
- j. Pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja pegawai;
- k. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMBANGUNAN DESA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa;
- c. Penyelenggaraan penataan dan pelatihan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;
- e. Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- f. Penyelenggaraan koordinasi teknis pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa;
- g. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penataan dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan

Seksi Penataan dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan penataan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penataan dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penataan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan penataan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan;
- c. Pengendalian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
- d. Pengendalian pemberdayaan masyarakat dan kelompok sosial budayadesa;
- e. Pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan penataan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan;

- f. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan Pembangunan Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

Seksi Perencanaan Pembangunan Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Perencanaan Pembangunan Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
- c. Pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;
- d. Pengendalian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
- e. Pengendalian pengembangan kawasan perdesaan;
- f. Pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
- g. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan tata pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan tata pemerintahan desa;

- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan tatapemerintahan desa;
- c. Penyelenggaraan penataan Pemerintahan Desa
- d. Penyelenggaraan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Penyelenggaraan pengembangan kapasitas Aparatur Desa;
- f. Penyelenggaraan pembinaan kerjasama Desa;
- g. Penyelenggaraan koordinasi teknis pembinaan tata pemerintahan desa;
- h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan tatapemerintahan desa;dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penataan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Seksi Penataan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penataan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Pengendalian penataan administrasi pemerintahan desa;
- d. Pengendalian pembinaan kelembagaan pemerintahan desa;
- e. Pengendalian penyusunan peraturan desa;
- f. Pengendalian pembinaan pengelolaan aset desa;
- g. Pengendalian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. Pengendalian sistem informasi pemerintahan desa;
- i. Pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- j. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;dan

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kerjasama Desa

Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kerjasama Desa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur dan kerjasama desa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kerjasama Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pengembangan kapasitas aparatur dan kerjasama desa;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan kapasitas aparatur dan kerjasama desa;
- c. pengendalian pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar, studi banding dan kegiatan pengembangan lainnya
- d. Pengendalian pelaksanaan kerjasama desa;
- e. Pengendalian pembinaan pengelolaan keuangan desa;
- f. Pengendalian koordinasi teknis pengembangan kapasitas aparatur dan kerjasama desa;
- g. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kapasitas aparatur dan kerjasama desa; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan usaha ekonomi desa dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan usaha ekonomi desa danpendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan usahaekonomi desa dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- c. Penyelenggaraan pembinaan usaha ekonomi desa;
- d. Penyelenggaraan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- e. Penyelenggaraan pembinaan usaha ekonomi desa dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan statistik Sektoral Pemerintah Daerah;dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan usaha ekonomi Desa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha ekonomi Desa;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan usaha ekonomi Desa;
- c. Pengendalian pelaksanaan penguatan usaha ekonomi desa;
- d. Pengendalian pembinaan Badan Usaha Desa;
- e. Pengendalian koordinasi teknis pengembangan usaha ekonomi Desa
- f. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi Desa;dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyelenggarakan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- c. Pengendalian pelaksanaan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- d. Pengendalian koordinasi teknis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- e. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Kelompok jabatan fungsional tersebut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kondisi Kepegawaian

a. Berdasarkan Formasi Jabatan (*Tabel 1.1*)

No	Tingkat Jabatan	Eselon	Formasi	Bezetting	Ket.
1	Kepala Dinas	1			
2	Sekretaris	1			
3	Kepala Bidang	3			
4	Kasubag	2			
5	Sub. Bidang	6			
6	Staf	15			
7	PTT (Non PNS)	23			

b. Berdasarkan Pendidikan (*Tabel 1.2*)

No	Tingkat Pendidikan	Status Pegawai		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	Pasca Sarjana	6	-	
2	Sarjana (S1)	18	14	
3	Diploma III	-	-	
4	Diploma II	-	-	
5	Diploma I	-	-	
6	SLTA	4	9	
	Jumlah	28	23	

c. Berdasarkan Pangkat/Golongan (*Tabel 1.3*)

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah		Jumlah	Ket.
		L	P		
1	Pembina Utama / IV e	-	-	-	
2	Pembina Utama Madya / IV d	-	-	-	
3	Pembina Utama Muda / IV c	1	-	1	
4	Pembina Tk. I / IV b	-	1	1	
5	Pembina / IV a	1	1	2	
6	Penata Tk. I / III d	-	4	4	
7	Penata / III c	7	2	9	
8	Penata Muda Tk. I / III b	2	2	4	
9	Penata Muda / III a	1	2	3	
10	Pengatur Tk. I / II d	-	-	-	
11	Pengatur / II c	2	-	2	
12	Pengatur Muda Tk. I / II b	-	-	-	
13	Pengatur Muda / II a	-	-	-	
14	Juru Tk. I / I d	-	-	-	
15	Juru / I c	-	-	-	
16	Juru Muda Tk. I / I b	-	-	-	
17	Juru Muda / I a	-	-	-	

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi manajemen kepegawaian daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar memiliki sumber daya manusia yang cukup potensi dengan kinerja yang cukup memadai.

Jumlah Pegawai pada DPMD berdasarkan gender 28 orang, yang terdiri dari :

Laki-laki sebanyak : 15 orang

Perempuan sebanyak : 13 orang

Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang

Selain didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam penyelesaian tugas dan fungsi organisasi. Hal ini dapat diamati dengan tersedianya peralatan komputer dan printer disetiap ruangan yang didukung dengan akses layanan/koneksi internet, ruangan kerja dan ruang pelayanan ber AC, ketersediaan meja kursi pegawai, ruang rapat dan peralatan penunjang lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

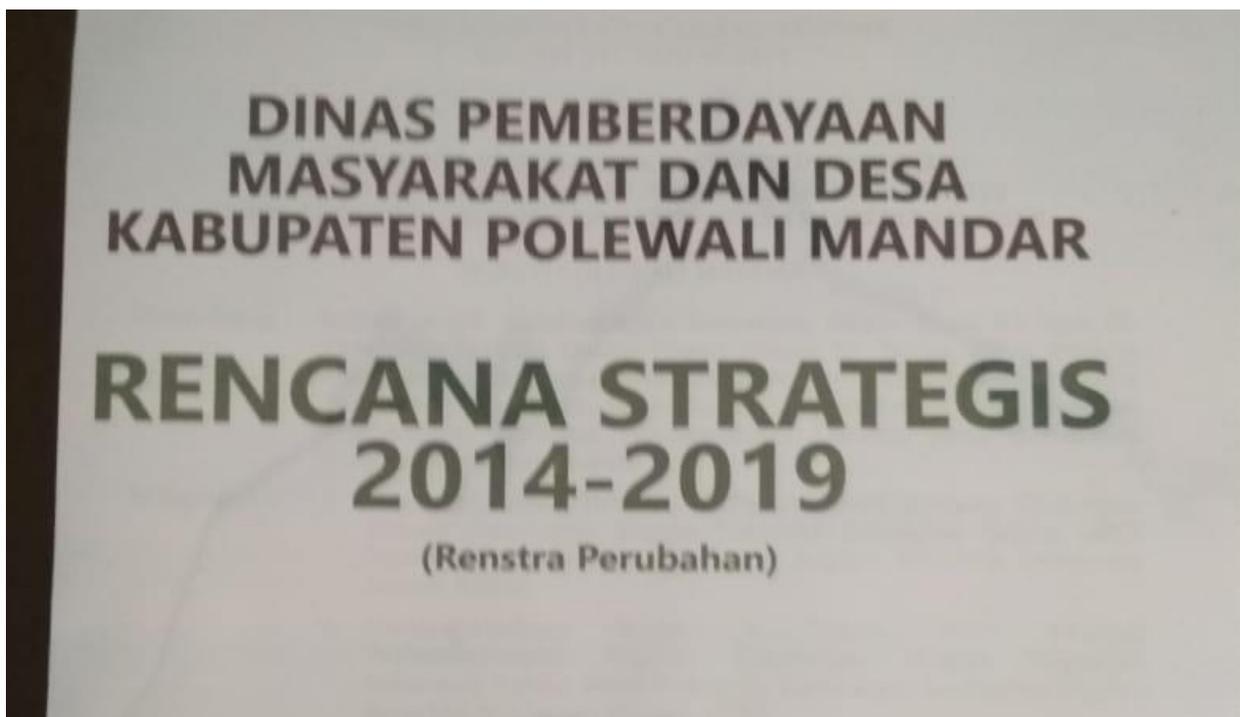
A. Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DPMD Kabupaten Polewali Mandar telah merumuskan

VISI : “Terwujudnya otonomi desa dan keberdayaan masyarakat yang partisipatif”

MISI : 1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif dan berkualitas.
2. Mengembangkan peran kelembagaan dalam pembangunan partisipatif.



Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra

Sasaran merupakan operasionalisasi dari visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir yang ingin dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan capaian terukur dari tujuan yang dirumuskan.

Adapun Sasaran Rencana Kerja DPMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa.

Adapun indikator untuk mengukur capaian sasaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

- Persentase desa/kelurahan yang difasilitasi penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatannya.
- Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adapun indikator untuk mengukur capaian sasaran tersebut antara lain sebagai berikut:

- Persentase desa yang melaksanakan Musrenbang secara tepat waktu
- Persentase kehadiran masyarakat pada Musrenbang tiap desa
- Persentase desa aygn telah menyusun laporan keuangan desa
- Persentase desa bebas temuan pertanggungjawaban keuangan desa
- Persentase desa yang menyusun data potensi desa yang valid

Sasaran 3 : Meningkatnya perekonomian masyarakat desa.

Adapun indikator untuk mengukur capaian sasara tersebut antara lain sebagai berikut:

- Persentase desa yang telah membentuk BadanUsaha Milik Desa (BUMDES)

B. Tujuan Umum

Berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah “Mewujudkan Otonomi Desa Dan Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ekonomi, Sosial Dan Budaya”.

Tujuan Khusus

Untuk mendukung tujuan umum, dalam renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan delapan tujuan khusus yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
- b. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
- c. Memantapkan Pelaksanaan Program Generasi Sehat Cerdas dan dukungan daerah daerah tertinggal.
- d. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial Budaya Masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender serta peningkatan kemandirian tenaga kerja pedesaan.
- e. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat.
- f. Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendaya gunakan Teknologi Tepat Guna.
- g. Meningkatkan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- h. Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Desa lingkup regional

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019 ini, sangat disadari secara organisasi memiliki sejumlah kendala batas kemampuan sumberdaya yang dimilikinya dalam mencapai sasaran-sasaran yang diharapkan. Oleh karena itu, sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut dirumuskan secara prioritas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini mengacu pula pada arah dan kebijakan umum yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024. Adapun Rencana Kerja Tahunan yang diprioritaskan pada tahun anggaran 2020 antara lain sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa.

Dijabarkan dalam Indikator Kinerja sebagai berikut :

- Jumlah peserta yang dilakukan pembinaan Diklat Tenaga Teknis Masyarakat (KPMD)
- Jumlah Kecamatan yang melaksanakan kegiatan bulan bakti gotong royong
- Jumlah desa yang membentuk kawasan perdesaan
- Jumlah desa yang menghasilkan dokumen pengembangan kawasan perdesaan
- Jumlah desa dan kelurahan yang dibina ikut komba posyandu
- Jumlah desa pembinaan Expo TTG
- Jumlah kelompok masyarakat pengguna Teknologi Tepat Guna
- Jumlah peningkatan kuantitas dan kualitas produk Teknologi Tepat Guna

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dijabarkan dalam Indikator Kinerja sebagai berikut :

- Ditetapkannya hasil pelaksanaan Lomba Desa
- Terbinanya Aparat pemerintahan desa
- Tersusunnya data profil desa dan kelurahan berbasis aplikasi
- Jumlah kepala desa yang dilantik untuk periode 6 tahun 2018 – 2024
- Cakupan desa yang APBDesnya sinkron dengan perencanaan kabupaten
- Cakupan desa yang aplikasi keuangannya sinkron dengan aplikasi perencanaan kabupaten

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya perekonomian masyarakat desa.

Dijabarkan dalam Indikator Kinerja sebagai berikut :

- Jumlah desa yang mengikuti Expo potensi desa
- Jumlah pengelola BUMDes yang dilatih
- Jumlah kelompok yang dibina dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat

C. Penetapan Kinerja Tahun 2019

Untuk mengukur sejauhmana DPMD telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, maka pada masing-masing tujuan strategis dimaksud telah ditetapkan indikator kinerja dan targer kinerja yang harus dicapai pada 2019, sangat disadari bahwa secara organisasi memiliki sejumlah kendala sebagai batas kemampuan sumberdaya yang dimilikinya dalam mencapai sasaran-sasaran yang diharapkan. Oleh karena itu, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut dirumuskan secara prioritas. Penyusunan program dan kegiatan prioritas ini mengacu pula pada arah dan kebijakan umum yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024. Adapun program dan kegiatan yang diprioritaskan pada tahun anggaran 2019 antara lain sebagai berikut :

Dijabarkan dalam Indikator Kinerja, TargetProgram dan Kegiatan, Anggaran.

Sasaran 1 : Meningkatnya kapastias kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa

- 1. Indikator Kinerja : Persentase desa/kelurahan yang difasilitasi penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatannya
- Target : 100%
- Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- Kegiatan : Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat
- Anggaran : Rp. 167.499.000,-
- Kegiatan : Pembinaan dan Gelar Teknologi Tepat Guna
- Anggaran : Rp. 147.500.000,-

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

- 1. Indikator Kinerja : Persentase desa yang melaksanakan Musrenbang secara tepat waktu
- Target : 100%
- Program : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun pedesaan
- Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
- Anggaran : Rp.87,501,000.00,-

2. Indikator Kinerja : Terbinanya Aparat Pemerintahan Desa
 Target : 100%
 Program : Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
 Kegiatan : Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan administrasi dan keuangan desa
 Anggaran : Rp. 150.000.000,-
3. Indikator Kinerja : Cakupan desa yang APBDesnya sinkron dengan perencanaan kabupaten
 Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 Kegiatan : Pembinaan dan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes
 Anggaran : Rp. 200.000.000,-
- Sasaran 3 : Meningkatnya perekonomian masyarakat desa**
1. Indikator Kinerja : Jumlah kelompok yang dibina dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat
 Target : 100%
 Program : Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
 Kegiatan : Pengembangan Expo Potensi Desa
 Anggaran : Rp. 62.500.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk menilai, menganalisa, dan menginformasikan mengenai hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga untuk menjelaskan tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja yang dicapai instansi pemerintah dan perangkat daerah. Menilai dan menganalisis capaian kinerja sangatlah penting, untuk meyakinkan bahwa kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan. Dengan demikian hasil pengukuran akan memudahkan kita untuk menilai apakah “ berhasil atau tidak “. Analisis capaian kinerja dibangun secara menyeluruh pada semua level organisasi untuk memastikan optimalnya mekanisme pengumpulan data kinerja dan sebagai bahan review perbaikan kinerja setiap levelnya pada tahun selanjutnya. Penyajian analisis akuntabilitas kinerja perangkat daerah tahun 2019, diupayakan dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja tujuan Renstra untuk kondisi 2019;
2. Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah diperjanjikan untuk kondisi tahun 2019;
3. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya;
4. Uraian tentang program-program yang mendorong pencapaian kinerja sasaran;
5. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target dan solusi yang telah dilakukan, serta
6. Analisis akuntabilitas keuangan tahun 2019.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis dan evaluasi kinerja, dimaksudkan untuk menghitung capaian kinerja dari setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan serta dilakukan analisis pencapaian kinerja dengan menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan kegagalan dan keberhasilan masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pengukuran kinerja tersebut, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan.

Sasaran 1 : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019

Capaian indikator persentase desa/kelurahan yang difasilitasi penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan dan persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif tahun 2019 :

TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
92%	92%	100%

1. Kemandirian masyarakat desa merupakan salah satu target utama pembangunan era sekarang ini. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang masuk kedesa semuanya mengusung sasaran terwujudnya kemandirian masyarakat desa. Salah satu indikator kemandirian tersebut adalah berfungsinya kelembagaan masyarakat desa termasuk kelurahan, dalam rangka keterlibatan seluruh unsure stakeholder tingkat desa-kelurahan pada proses pembangunan, baik pembangunan atas prakarsa eksternal (pembangunan melalui berbagai SPKD dan swasta) terutama pembangunan atas prakarsa masyarakat itu sendiri secara swadaya.

Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan. Fasilitas dalam pengertian pembinaan dan penguatan lembaga kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dan Kades Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K). Sasaran pembinaan akumulasi dari tahun 2012 s/d tahun 2019 jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan yang tersebut di 16 kecamatan sejumlah 144 desa dan 23 kelurahan dengan target 92%.

b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Pada Tabel di bawah ini disajikan sebagai perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa untuk tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya :

Tabel III. 1
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2017 dan 2018) UNTUK SASARAN 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	Persentase desa/ kelurahan yang difasilitasi penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan	92	92	100

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi Kinerja antara 2019 dengan tahun 2017 tidak dapat diperbandingkan. Hal ini disebabkan adanya review atau perubahan terhadap sasaran dan indikator kinerja Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2019, Sedangkan dari tahun 2018 ke 2019 ada kenaikan sebesar 8 %.

c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dengan Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa dengan target Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2014-2019.

Tabel III.2
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 1
TAHUN 2019 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2014-2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	Persentase desa/ kelurahan yang difasilitasi penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan	100	100	92	92	92

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 terhadap target jangka menengah (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2014-2019 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa dengan indikator kinerja Persentase desa/kelurahan yang difasilitasi penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan, perlu dilakukan perbaikan target di tahun-tahun berikutnya.

d. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa dengan indikator kinerja persentase desa/kelurahan yang difasilitasi penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatannya yang dijalankan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa dengan Jumlah Pegawai sebanyak 5 (lima) pegawai dengan menggunakan anggaran Program Penataan Pemerintahan Desa sebesar **Rp. 605.000.000.**

e. PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG :

Upaya peningkatan persentase desa/kelurahan yang difasilitasi penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan dan persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif di dukung oleh Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan yang terdiri atas kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat

Jumlah dana Rp. 167.499.000,- Realisasi Rp. 167.499.000

2. Pembinaan dan Gelar TTG

Jumlah dana Rp. 137.500.000,- Realisasi Rp. 137.461.940

Penjelasan Realisasi Target Kegiatan

Untuk realisasi kegiatan mencapai 100%, yaitu fasilitasi dalam pengertian pembinaan dan penguatan lembaga kemasyarakatan, lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (LPMD) dan kader pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (KPMD) tersebar di 16 kecamatan sejumlah 144 desa dan 23 kelurahan.

f. KENDALA SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Kendala

Sampai laporan ini disusun, ada beberapa lembaga pemberdayaa masyarakat (LPM) yang belum terangkum secara keseluruhan dan belum terdata secara optimal.

Solusi

Karena yang menjadi kendala utama adalah anggaran agar lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang belum terdata dapat terangkum dan terdata dengan baik.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Indikator 1: Persentase Desa yang melaksanakan Musrenbang secara tepat waktu

a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019

Capaian indikator persentase desa/kelurahan yang melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan secara tepat waktu :

TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
144 Desa	144 Desa	100%

Dalam aspek kelembagaan pemerintah desa, persoalan umum yang dialami adalah aspek kualitas administrasi pemerintahan desa. hal yang menyangkut administrasi antara lain dokumen perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pembinaan serta peningkatan kemampuan Kepala Desa beserta aparatnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa. kegiatan yang dimaksud seperti asistensi perencanaan dan penganggaran. Sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta melalui Pelatihan Peningkatan SDM aparat.

b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Pada Tabel di bawah ini disajikan sebagai perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel III. 1

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2017 dan 2018) UNTUK SASARAN 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbang secara tepat waktu	144	144	144

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara 2017 dengan tahun 2019 berbicara target mencapai 100 % dari 144 desa sudah terpenuhi. Hal ini berarti dari 144 desa yang di Kabupaten Polewali Mandar sudah melaksanakan musyawarah perencanaan

pembangunan secara tepat waktu sesuai dengan penetapan kinerja atau target yang telah ditetapkan.

c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dengan Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan target Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2014-2019

Tabel III.2

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 2
TAHUN 2019 DENGANTARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2014-2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbang secara tepat waktu	144	144	144	144	144

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 terhadap target jangka menengah (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2014-2019 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator kinerja persentase desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbang secara tepat waktu, perlu dilakukan perbaikan target di tahun-tahun berikutnya.

d. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator kinerja persentase desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbang secara tepat waktu yang dijalankan oleh Bidang Pemerintahan Desa dengan Jumlah Pegawai sebanyak 10 (Sepuluh) pegawai dengan menggunakan anggaran Program Penataan Pemerintahan Desa sebesar **Rp. 437.501.000**

e. PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG :

Upaya peningkatan persentase desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbang secara tepat waktu di dukung oleh Program Penataan Pemerintahan Desa yang terdiri atas kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Jumlah dana Rp. 87.501.000,- Realisasi Rp. 87.391.000
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Administrasi Keuangan Desa
Jumlah dana Rp. 150.000.000,- Realisasi Rp. 150.000.000
3. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes
Jumlah dana Rp. 200.000.000,- Realisasi Rp. 200.000.000

Penjelasan Realisasi Target Kegiatan

Aspek kualitas administrasi menjadi penunjang penting dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa., berupa asistensi perencanaan dan penganggaran untuk penetapan kinerja atau realisasi kegiatan yang telah ditetapkan mencapai target 100 % .

f. KENDALA SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Kendala

Sejak berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, banyak melahirkan aturan perundang-undangan yang menjadi turunannya. Tentu membawa banyak perubahan bagi pemerintah desa terutama mindset (pola pikir) yang sesuai manajemen pemerintahan sesuai amanat dari aturan perundang-undangan yang berlaku sekarang.

Solusi

Karena yang menjadi kendala utama adalah perlunya banyak pelatihan yang mengarah pada peningkatan SDM pemerintah desa karena anggaran yang ada dan turun ke desa sangat besar.

Tabel III.3

Persentase desa yang melaksanakan Musrenbang secara tepat waktu

No	Desa	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
		Target	Target	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	%	%	%
1	Desa	144	144	144	144	144	144	100	100	100
Jumlah		144	144	144	144	144	144	100	100	100

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa adalah peningkatan kapasitas aparat desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan di desa melalui kegiatan pelatihan. Jumlah aparat desa yang telah menyelesaikan administrasi desa untuk periode 2017-2019 sebanyak 144 desa dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa berbasis aplikasi Siskeudes pada tahun 2019 di Mamuju tanggal 1 s/d 5 Februari 2019 dengan jumlah 206 peserta yang diikuti oleh Sekretaris Desa dan Bendahara Desa dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Bimbingan Teknis Kewenangan Desa di Makassar tanggal 1 s/d 4 April 2019 dengan peserta terdiri dari Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 139 orang dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pada tahun 2019 terjadi peningkatan pencapaian kinerja menjadi 100%, hal ini disebabkan karena pada tahun ini juga dilaksanakan kegiatan pelatihan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Pelatihan Bimbingan Teknis Kewenangan Desa di Makassar yang diikuti oleh para Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian pelatihan selanjutnya adalah Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa berbasis aplikasi Siskeudes pada tahun 2019 di Mamuju dengan pesertaterdiri dari Sekretaris Desa dan Bendahara Desa dengan pendanaan yang berasal dari APBD Desa. Kegiatan pelatihan dan sejenisnya sudah tidak dianggarkan pada anggaran dana APBD Dinas PMDdikarenakan anggaran OPD tiap tahun menurun dan Dinas PMD hanya melakukan fasilitasi kegiatan pelatihan saja. Adapapun masing-masing dengan rincian kegiatan di tahun 2019 adalah sebagai berikut :



Tabel III.4

Nama Desa yang mengikuti pelatihan Siskeudes tahun 2019

No	Nama	Desa	Jabatan
1	TASLIM, SKM	Karama	Sekdes
2	HERIYANTO	Tangnga-Tangnga	Kaur Keuangan
3	MUH. TANWIR. A	Lekopaddis	Kaur Administrasi
4	SABRIATI HARUNA	Lekopaddis	Kaur Keuangan
5	RONNI K	Galung Lombok	Sekdes
6	ERNAWATY	Galung Lombok	Kaur Keuangan
7	MARZUKI	Tandung	Sekdes
8	MULIADI	Tandung	Kaur Keuangan
9	HURIAH	Batulaya	Sekdes

10	ABDUL RAJAB	Batulaya	Kaur Keuangan
11	ANSAR	Sepabatu	Kaur Keuangan
12	ABD. RAJAB	Laliko	Sekdes
13	BENTAR	Laliko	Kaur Keuangan
14	TAUFIK FIRMANSYAH	Bonde	Kaur Keuangan
15	HARMIN	Katumbangan Lemo	Sekdes
16	ANDI HASIM MAKKARUMPA	Panyampa	Kaur Keuangan
17	USMAN	Lampoko	Kasi Pemerintahan
18	AHMAD	Lampoko	Kaur Keuangan
19	NASARUDDIN, S.Pd	Katumbangan	Kaur Keuangan
20	MUH. ARDIANSYAH, S,Pd	Lapeo	Sekdes
21	ADIATMA	Lapeo	Kaur Keuangan
22	AMIRULLAH	Parappe	Kades
23	FITRIANI	Parappe	Kaur Keuangan
24	SUDIRMAN, A.Md.Kom	Ongko	Kaur Keuangan
25	H. HAMSAH	Botto	Sekdes
26	ABDUL HARIS	Botto	Kaur Keuangan
27	SYAMSUDDIN	Gattungang	Sekdes
28	MUNIRA	Gattungang	Kaur Keuangan
29	KAMARUDDIN	Padang	Kaur Keuangan
30	SRY MAGHFIRA	Lagi agi	Kaur Keuangan
31	MUH. YASIN, S.Pd	Sidorejo	Sekdes
32	DWI WIDODO	Sidorejo	Kaur Keuangan
33	SEPTI RAMAYANTI, S.KM	Sumberjo	Kaur Perencanaan
34	PIKA ASRI RAHAYU	Sumberjo	Kaur Keuangan
35	EKAWATI	Bumiayu	Sekdes
36	EKA WAHYUNINGSIH	Bumiayu	Kaur Keuangan
37	ALIF IWAN NDOYO	Kebunsari	Kasi Kesra
38	RESKIANTI	Kebunsari	Kaur Keuangan
39	RAHMAH, S.Kom	Banua Baru	Sekdes
40	AHMAD	Banua Baru	Kaur Keuangan

41	HARDIANA	Nepo	Kaur Keuangan
42	HARIADI SAPUTRA	Sugihwaras	Kaur Perencanaan
43	IDA NURSANTI	Sugihwaras	Kasi Pelayanan
44	DWI JAYANTI, S.Kom	Campurjo	Kaur Keuangan
45	ANHAR SAPUTRA	Bumimulyo	Kaur Keuangan
46	KARMA KABBA	Tumpiling	Kaur Keuangan
47	DARWIS	Bakka-Bakka	Kades
48	MASNA, S.Pd	Bakka-Bakka	Kaur Keuangan
49	SEPTO ARI PRIONO	Arjosari	Sekdes
50	KARSIDI	Arjosari	Kaur Keuangan
51	NURDIN	Galeso	Kasi Kesra
52	FAISAL	Galeso	Kasi Pembangunan
53	BASRI	Ambopadang	Kaur Keuangan
54	SARDING	Tubbi	Sekdes
55	UMAR	Tubbi	Kaur Keuangan
56	IRWAN, S.Pd	Ratte	Kaur Keuangan
57	ERWIN	Ratte	Kasi Pemerintahan
58	NURSAN	Besoangin	Kaur Keuangan
59	MASTURA	Piriang Tapiko	Sekdes
60	ANDI ASPAN MUHLIS, S.Pd	Piriang Tapiko	Kaur Keuangan
61	ABDUL JAFAR	Peburru	Kaur Keuangan
62	ABD. RAJAB	Taloba	Kasi Kesra
63	HERMAN, SH.i	Arabua	Kaur Keuangan
64	ABDULLAH	Besoangin Utara	Sekdes
65	J AIS, S.Pd	Besoangin Utara	Kaur Keuangan
66	RUDI	Poda-Poda	Kaur Keuangan
67	IRAWARI HARUNA, S.Pd	Poda-Poda	Kaur Administrasi
68	USMAN	Taramanu Tua	Sekdes
69	LUKMAN	Taramanu Tua	Kaur Keuangan
70	MAHYUDDIN	Tonyaman	Kaur Keuangan
71	SYAHRUL	Kuajang	Sekdes

72	WAHYUNI	Paku	Kaur Keuangan
73	ABD. RASYID. B	Mirring	Kaur Keuangan
74	ABDUL AZIS	Batetangnga	Kasi Pemerintahan
75	SYARIFUDDIN	Batetangnga	Kaur Keuangan
76	DARWIS	Mammi	Sekdes
77	KASMAWATI	Mammi	Kaur Keuangan
78	RAIS HADI	Kaleok	Sekdes
79	AMRIN	Kaleok	Kaur Keuangan
80	AHMAD FAIZAL	Amola	Kaur Keuangan
81	HARSONO	Rea	Kaur Keuangan
82	IBRAHIM, S.IP	Tapango	Sekdes
83	ERVINA ARSYAD	Tapango	Kaur Keuangan
84	ROHANIAH HAJAR, S.Pd	Dakka	Kaur Keuangan
85	SITTI SALMAH	Batu	Kaur Keuangan
86	ANDI SAUMA TENRIPAWA	Batu	Kasi Kesra
87	H. ONANG, S.IP	Riso	Sekdes
88	ROSDIANA	Palatta	Kaur Keuangan
89	DERMAWAN	Tapango Barat	Sekdes
90	AMSAR	Tapango Barat	Kaur Keuangan
91	YUSUF, S.Pd.I	Kurrak	Kaur Keuangan
92	RASNAH	Bussu	Kaur Keuangan
93	SALIM	Bussu	Kaur Perencanaan
94	ERDAWATI, S.IP	Kalimbua	Kaur Keuangan
95	MUSTAKIM, S.IP	Kalimbua	Sekdes
96	KOMARIYAH, S.Pd	Banatorejo	Kasi Pemerintahan
97	ASTRI	Banatorejo	Kaur Keuangan
98	KARLINA	Ugibaru	Kaur Keuangan
99	LUKMAN, S.Sos	Rumpa	Sekdes
100	ABD. RAHIM	Rumpa	Kaur Keuangan
101	MARDAWATI, S.IP	Kurma	Sekdes
102	FADLI	Buku	Sekdes

103	ANWAR	Buku	Kaur Keuangan
104	FADILA	Bonne-Bonne	Kaur Keuangan
105	APRIANI	Bonne-Bonne	Kaur Administrasi
106	ANUGRAH KURNIAWAN	Beroangin	Sekdes
107	HAMRIATI	Beroangin	Kaur Keuangan
108	PATTOLA, S.Pd	Segerang	Sekdes
109	HARDIANTI, S.Pd	Segerang	Kaur Keuangan
110	M. ANAS, S.Pd	Bonra	Sekdes
111	NOVIA NINGSIH	Bonra	Kaur Keuangan
112	MA'RUF. S	Sattoko	Kaur Keuangan
113	IRFAN, S.IP	Rappang Barat	Sekdes
114	IBRAHIM	Rappang Barat	Kaur Keuangan
115	HALIPPUDDIN	Landi Kanusuang	Kades
116	SOFYAN	Landi Kanusuang	Kaur Keuangan
117	HAMSAH	Lilli	Kaur Administrasi
118	NURMIATI	Lilli	Kaur Keuangan
119	ARHAM	Rangoan	Kades
120	RAHBAN	Tapua	Sekdes
121	HAMKA	Tapua	Kaur Keuangan
122	USMAN UMAR, SE	Ba'ba Tapua	Sekdes
123	ALWI	Ba'ba Tapua	Kaur Keuangan
124	SAHRUL SYAM	Mambu Tapua	Kaur Administrasi
125	FITRIANI	Mambu Tapua	Kaur Keuangan
126	SATRIA CANRA DIMUKA	Katimbang	Kaur Keuangan
127	DERMAWAN, S.Kom	Mambu	Sekdes
128	NAHIDA, S.Pd.I	Mambu	Kaur Keuangan
129	HAMSI, A.Md.Kom	Tenggeling	Kaur Keuangan
130	MUHAMMAD SALEH	Baru	Sekdes
131	IRFAN WAHAB	Baru	Kaur Keuangan
132	MARDAWIAH	Pussui	Kaur Keuangan
133	KAIMUDDIN, S.Pd.I	Mapilli Barat	Sekdes

134	SARDIN, S.Pust	Mapilli Barat	Kaur Administrasi
135	ALBAR, SH	Sambaliwali	Sekdes
136	HERNAWATI	Sambaliwali	Kaur Keuangan
137	NURSAN	Batupanga Daala	Sekdes
138	SAMIA SALEHANI	Batupanga Daala	Kaur Keuangan
139	HERMAN	Luyo	Sekdes
140	ANDI MASITA R	Luyo	Kaur Keuangan
141	DERMAWAN	Pussui Barat	Kades
142	USMAN	Puccadi	Sekdes
143	ARMAN	Puccadi	Kaur Keuangan
144	MUHAMMAD ALIM	Lembang-Lembang	Sekdes
145	HABRIANI, S.Kom	Lembang-Lembang	Kaur Keuangan
146	ILHAMUDDIN	Tandassura	Kasi Pelayanan
147	SYAHRUDDIN	Tandassura	Kaur Keuangan
148	SYAHRIR KALLO, S.IP	Samasundu	Sekdes
149	ISHAR, S.IP	Samasundu	Kaur Administrasi
150	IRFAN	Napo	Kasi Pemerintahan
151	HASANUDDIN	Napo	Kaur Keuangan
152	HASBI ANAS	Todang-Todang	Kaur Keuangan
153	SUFAJRI	Pendulangan	Sekdes
154	HASIM	Pendulangan	Kaur Administrasi
155	ABD. HAFID, S.IP	Renggeang	Sekdes
156	SALAHUDDIN	Renggeang	Kaur Keuangan
157	NURHAISAH	Salarri	Sekdes
158	IDRUS ALI	Salarri	Kaur Administrasi
159	ASLIA YUSNI, S.KM	Tangan Baru	Kaur Keuangan
160	IRWAN USMAN	Palece	Sekdes
161	MAHMUD, A.Md.Kom	Palece	Kaur Keuangan
162	SALIHA, S.Pd	Tammajarra	Kasi Pelayanan
163	ROBIN	Tammangalle	Kasi Kesra
164	ASRI	Legu	Kades

165	HAMUD	Lego	Kaur Keuangan
166	ASLI, SE	Pallis	Sekdes
167	SUDIRMAN	Pallis	Kaur Keuangan
168	NURUL FADLAN	Galung Tuluk	Kaur Administrasi
169	MUH. KASIM	Sabang Subik	Kasi Kesra
170	ANWAR, S.Si	Sabang Subik	Kaur Keuangan
171	SUKMAWATI	Duampanua	Sekdes
172	AYYUB	Duampanua	Kasi Pelayanan
173	MASKI	Kelapa Dua	Kasi Pelayanan
174	MAHENDRA	Kelapa Dua	Kaur Administrasi
175	IIN ASISKA	Pappandangan	Kaur Administrasi
176	EMANG	Pappandangan	Kaur Keuangan
177	DARWAN, S.Kom	Kunyi	Kaur Keuangan
178	MAKMUR	Patampanua	Kasi Kesra
179	YULIANA	Patampanua	Kaur Keuangan
180	KAMARUDDIN	Barumbung	Sekdes
181	NURDIN. BR	Barumbung	Kasi Kesra
182	ZAHRANI SUCI	Pasiang	Kaur Keuangan
183	BURHANUDDIN L	Tonrolima	Kaur Keuangan
184	LISA RAHMAN	Indu Makombong	Kasi Pemerintahan
185	MARWIYAH UTAMI	Indu Makombong	Kaur Keuangan
186	MUHAMMAD IQBAL	Bunga-Bunga	Kaur Keuangan
187	SAMSIR	Kalumammang	Sekdes
188	LUKMAN	Kalumammang	Kaur Keuangan
189	ABDUL HAMID, SE	Pao-Pao	Sekdes
190	AKHMAD	Puppuring	Kaur Keuangan
191	ANSARULLAH	Saragian	Kaur Keuangan
192	NADIR	Bulo	Kaur Keuangan
193	ILHAM	Bulo	Kasi Pemerintahan
194	NAIM HAFIDZ L, S.IP	Pulliwa	Sekdes
195	ILHAM S	Pulliwa	Kaur Keuangan

196	M. NASIR	Patambanua	Sekdes
197	YUSRAN, S.IP	Patambanua	Kasi Pemerintahan
198	HASING	Patambanua	Kaur Keuangan
199	RUSMAN	Karombang	Kaur Keuangan
201	SUMARDIN	Daala Timur	Kaur Keuangan
202	HAMKA	Lenggo	Sekdes
203	SABRI	Lenggo	Kaur Keuangan
204	HENDRIK	Sabura	Sekdes
205	RAHMAT	Ihing	Sekdes
206	BASARUDDIN	Ihing	Kaur Keuangan



Tabel III.5

Kepala Desa dan BPD yang mengikuti pelatihan di Tahun 2019

No	Nama Peserta	Desa	Jabatan
1	AHMAD MA'DANRANG	Karama	Kepala Desa
2	MUHAMMAD ARSYAD. AR	Tangnga-Tangnga	Kepala Desa
3	MUDIR	Lekopadis	Kepala Desa
4	Drs. NURSYAHID, MM	Lekopadis	Ketua BPD
5	IHSAN	Galung Lombok	Kepala Desa
6	MULIADI	Tandung	Kaur Keuangan
7	MUHAMMAD IDHAM	Batulaya	Kepala Desa
8	ALIBAS	Sepabatu	Kepala Desa
9	S. USMAN ABBAS	Bonde	Kepala Desa
10	ILHAM TOTORANG	Panyampa	Kepala Desa
11	NURJANNAH SAMAD	Suruang	Kepala Desa
12	ABD. RASYAK	Lampoko	Kepala Desa
13	M. AS'AD MAS'UD, SH	Lampoko	Ketua BPD
14	NURANDA TATO	Katumbangan	Kepala Desa
15	BAHARUDDIN	Katumbangan	Ketua BPD
16	M. ARDIANSYAH	Lapeo	Sekdes
17	AMINUDDIN	Parappe	Kepala Desa
18	ALIMUDDIN	Kenje	Kepala Desa
19	SUDIRMAN	Sumarrang	Kepala Desa
20	ABD. RASYAK	Botto	Kepala Desa
21	H. JAMALUDDIN	Botto	Ketua BPD
22	JALALUDDIN	Padang Timur	Kepala Desa
23	SAHABUDDIN	Padang	Kepala Desa
24	FIRMAN	Lagi Agi	Kepala Desa
25	NURDIN	Sidorejo	Kepala Desa
26	MUHAMMAD THALLIB, S.Pd.,M.Pd	Sidorejo	Ketua BPD
27	MURDIFIN	Sumberjo	Kepala Desa
28	SUPRAPTO, SE	Sumberjo	Ketua BPD

29	SUTOLU	Bumiayu	Kepala Desa
30	SUROSO	Bumiayu	Ketua BPD
31	HERI SISWANDI	Kebunsari	Kepala Desa
32	M. TAUFIK MUSTAMAN	Banua Baru	Kepala Desa
33	TAHALUDDIN	Nepo	Kepala Desa
34	TASLIM	Nepo	Ketua BPD
35	WARSITO	Sugihwaras	Kepala Desa
36	ARJI	Bumimulyo	Kepala Desa
37	Drs. SUTIYONO	Bumimulyo	Ketua BPD
38	ABDUL RAHMAN SAKKA	Tumpiling	Kepala Desa
39	LUKMAN	Tumpiling	Ketua BPD
40	DARWIS	Bakka-Bakka	Kepala Desa
41	SAHABUDDIN	Arjosari	Kepala Desa
42	M. MUKMIN	Arjosari	Ketua BPD
43	H. SUARDI	Galeso	Kepala Desa
44	SAKIR. R	Galeso	Ketua BPD
45	PAHRUDDIN	Ambopadang	Anggota BPD
46	RUKKUNG	Ambopadang	Sekdes
47	BACO	Tubbi	Kepala Desa
48	SYAMSUDDIN	Ratte	Kepala Desa
49	BASIR	Ratte	Ketua BPD
50	BURHANUDDIN	Besoangin	Kepala Desa
51	ANSAR	Besoangin	Ketua BPD
52	MUHAMMAD ALI, ST	Piriang Tapiko	Kepala Desa
53	SURIANTO	Piriang Tapiko	Ketua BPD
54	NURSAN	Tonyaman	Kepala Desa
56	H. MUHAMMAD. S	Kuajang	Kepala Desa
57	ISMAIL, ST	Kuajang	Ketua BPD
58	SYARIFUDDIN	Paku	Kepala Desa
59	SARIANTO	Mirring	Kepala Desa
60	JUSMAN, S.PD.I	Mammi	Ketua BPD

61	HERMAN	Kaleok	Kepala Desa
62	ZAIFULLAH	Rea	Kepala Desa
63	MUSTAPA. S	Rappang	Kepala Desa
64	AMIR	Dakka	Kepala Desa
65	SUNARTO	Batu	Kepala Desa
66	TAUHID	Batu	Ketua BPD
67	ACONG JUFRI	Riso	Kepala Desa
68	SUPARDI. T	Riso	Ketua BPD
69	HASBULLAH BAKRI	Tapango Barat	Kepala Desa
70	H. HAIDAR	Tapango Barat	Ketua BPD
71	ARIS	Kurrak	Kepala Desa
72	RADI	Bussu	Kepala Desa
73	FARIDA	Bussu	Ketua BPD
74	SYAMSUDDIN	Tuttula	Kepala Desa
75	MASNA, S.PD.I	Tuttula	Ketua BPD
76	SYAMPALISU	Kalimbua	Ketua BPD
77	WAKIDI	Banatorejo	Kepala Desa
78	YULIANI, A.Ma.Pust	Banatorejo	Ketua BPD
79	NASHIR	Ugi Baru	Kepala Desa
80	MULYADI, SP	Ugi Baru	Ketua BPD
81	FIRDAUS	Rumpa	Kepala Desa
82	JAIS	Kurma	Kepala Desa
83	ABD. KADIR	Kurma	Ketua BPD
84	AMINUDDIN	Buku	Kepala Desa
85	ZAINUDDIN	Bonne-Bonne	Kepala Desa
86	BUKHARI HADI, S.Pd.I	Bonne-Bonne	Ketua BPD
87	ANTO	Beroangin	Kepala Desa
88	ANDI AHMAD	Segerang	Kepala Desa
89	KADI	Segerang	Ketua BPD
90	H. ALIMUDDIN	Bonra	Kepala Desa
91	HAMZAH, A.MA	Sattoko	Kepala Desa

92	ACO ALIMUDDIN	Rappang Barat	Kepala Desa
93	AKHMAD	Tapua	Kepala Desa
94	MUHAMMAD RUSDI	Mambu Tapua	Kepala Desa
95	ANDI MUHAMMAD HAMKA YASIN	Ba'ba Tapua	Kepala Desa
96	HAYAMUDDIN	Mambu	Kepala Desa
97	RIDWAN	Mambu	Ketua BPD
98	NURDIANG	Tenggelang	Kasi
99	SAMSUDDIN	Baru	Kepala Desa
100	MUHAMMADIN	Baru	Ketua BPD
101	ARIFIN	Pussui	Kepala Desa
102	JAMRUDDIN	Pussui	Ketua BPD
103	ROI	Luyo	Kepala Desa
104	HAERIAH	Luyo	Ketua BPD
105	DERMAWAN	Pussui Barat	Kepala Desa
106	NASIR LESEI, S.Ag	Pussui Barat	Ketua BPD
107	HARUNA	Puccadi	Kepala Desa
108	AILING HARUNA	Puccadi	Ketua BPD
109	SAHARING	Napo	Kepala Desa
110	ADUL WAHAB	Napo	Ketua BPD
111	MOSER	Todang-Todang	Kepala Desa
112	HASANUDDIN	Todang-Todang	Ketua BPD
113	MUHAMMAD SALEH	Pendulangan	Kepala Desa
114	BAHARUDDIN	Pendulangan	Ketua BPD
115	BASRI. H	Renggeang	Kepala Desa
116	SUKRI TAWARAN	Salarri	Kepala Desa
117	HAMZAH	Salarri	Ketua BPD
118	SYAHRIL	Palece	Kepala Desa
119	HASANUDDIN	Tammajarra	Kepala Desa
120	SUFRI	Mosso	Kepala Desa
121	SAFARUDDIN	Mosso	Ketua BPD
123	HAIDIR DJALIL, S.IP	Sabang Subik	Kepala Desa

124	ABD. BASID	Bala	Kepala Desa
125	HATTA	Pallis	Kepala Desa
126	H. ARIFIN	Duampanua	Kepala Desa
127	MUHAMMAD SAING	Duampanua	Ketua BPD
128	MASDAR	Kelapa Dua	Kepala Desa
129	SAHARUDDIN	Kelapa Dua	Ketua BPD
130	H. MAKMUR	Pappandangan	Kepala Desa
131	SANGKALA	Pappandangan	Ketua BPD
132	ANRI	Kunyi	Kepala Desa
133	RUSLAN	Kunyi	Ketua BPD
134	H. ABDUL AZIS	Patampanua	Kepala Desa
135	ABDUL MALIK	Patampanua	Ketua BPD
136	SAKKA HAMMA	Barumbung	Kepala Desa
137	SYAFRUDDIN	Barumbung	Anggota BPD
138	MAWAR	Tonrolima	Kepala Desa
139	ABDUL RAHMAN K	Indu Makkomobong	Kepala Desa
140	MARTADINATA	Indu Makkombong	Ketua BPD
141	ABDUL RAUF	Bunga-Bunga	Kepala Desa
142	M. ARSYAD	Bunga-Bunga	Ketua BPD
143	MUHAMMAD YUSUF	Mombi	Kepala Desa
144	ASNAWI	Mombi	Anggota BPD
145	NURDIN GI'GI	Kalumammang	Kepala Desa
146	JAMALUDDIN. T	Kalumammang	Ketua BPD
147	HASAN	Pao-Pao	Kepala Desa
148	BAHARUDDIN	Pao-Pao	Ketua BPD
149	MISRAN	Puppuuring	Kepala Desa
150	HASBAR	Puppuuring	Ketua BPD
151	RAMLI	Saragian	Kepala Desa
152	DAHALIANG	Saragian	Ketua BPD
153	MAS'UD	Sayoang	Kepala Desa
154	ISRAIL	Sayoang	Ketua BPD

155	JELISMAN, SP	Alu	Kepala Desa
156	ABIDIN	Alu	Ketua BPD
157	BUHARI	Bulo	Kepala Desa
158	RUSMAN	Karombang	Kaur Keuangan
159	SUPARMAN	Daala Timur	Kepala Desa
160	ANDON	Daala Timur	Ketua BPD



Sasaran 3 : Meningkatnya perekonomian masyarakat desa

a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019

Capaian indikator persentase jumlah kelompok yang dibina dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan indikator persentase jumlah desa yang mengikuti expo potensi desa tahun 2019 :

TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
144 Bumdes	144 Bumdes	100%

Pendirian Badan Usaha Milik Desa sesuai amanat dari Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 bertujuan sebagai upaya menopang seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan untuk pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa, sehingga Badan Usaha Milik Desa diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga.

Dari tahun 2014 sampai dengan 2019 jumlah desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebanyak 143 desa dari 144 desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Pada Tabel di bawah ini disajikan sebagai perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran Strategis 3 : Indikator persentase jumlah kelompok yang dibina dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan indikator persentase jumlah desa yang mengikuti expo potensi desa tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel III. 1

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2017 dan 2018) UNTUK SASARAN 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
1	Meningkatnya perekonomian masyarakat desa	Persentase jumlah kelompok yang dibina dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan jumlah desa yang mengikuti expo potensi desa	100	143	144

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi Kinerja antara 2019 dengan tahun 2017 sesuai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya reviuw atau perubahan terhadap sasaran dan indikator kinerja Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2017.

c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dengan Sasaran Strategis 3 Meningkatnya perekonomian masyarakat desa dengan target Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2014-2019.

Tabel III.2
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 3
TAHUN 2019 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2014-2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1	Meningkatnya perekonomian masyarakat desa	Persentase jumlah kelompok yang dibina dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan jumlah desa yang mengikuti expo potensi desa	144	144	90	100	143

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 terhadap target jangka menengah (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2014-2019 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 3 : Meningkatnya perekonomian masyarakat desa dengan indikator kinerja persentase jumlah kelompok yang dibina dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan jumlah desa yang mengikuti expo potensi desa, sesuai target dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD.

d. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya perekonomian masyarakat desa dengan indikator kinerja persentase jumlah kelompok yang dibina dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan jumlah desa yang mengikuti kegiatan expo potensi desa yang dijalankan oleh Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna dengan jumlah pegawai sebanyak 5 (lima) pegawai dengan menggunakan anggaran Program Penataan Pemerintahan Desa sebesar **Rp. 225.004.000.**

e. PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG :

Upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa dengan indikator kinerja persentase jumlah kelompok yang dibina dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan jumlah desa yang mengikuti kegiatan expo potensi desa di dukung oleh Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa dan Teknologi Tepat Guna yang terdiri atas kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Expo Potensi Desa (Bumdesa)
Jumlah dana Rp. 77.504.000,- Realisasi Rp. 77.282.000
2. Pembinaan dan Gelar TTG
Jumlah dana Rp. 137.500.000,- Realisasi Rp. 137.500.000

Penjelasan Realisasi Target Kegiatan

Untuk realisasi kegiatan mencapai 100%, yaitu fasilitasi dalam pengertian pembinaan dan penguatan lembaga kemasyarakatan, lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (LPMD) dan kader pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (KPMD) tersebar di 16 kecamatan sejumlah 144 desa dan 23 kelurahan.

f. KENDALA SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Kendala

Sampai laporan ini disusun, sebagian Bumdes belum dikelola dengan baik dan harapan ada Bumdes yang maju seperti Bumdes di daerah pulau Jawa yang mampu meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan sumber daya desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, serta mampu meningkatkan atau menghasilkan income/pendapatan utama maupun tambahan bagi warganya.

Solusi

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi pasca pelatihan
2. Memberikan format dalam bentuk file
3. Menyurat para Camat yang ditandatangani oleh Bupati untuk disampaikan kepada para Kepala Desa tentang pembentukan Bumdes
4. Memberikan format dalam bentuk manual untuk pengisian data dengan harapan membantu untuk mempercepat pembentukan Bumdes
5. Memfasilitasi para kepala Desa yang membentuk Bumdes untuk mengkoordinasikan ke bagian Hukum tentang tata cara penertiban peraturan desa agar diseragamkan tata cara penulisannya.

Tabel 3.10

Desa-Desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

No	Desa	Nama Bumdes	Ket.
1	Tammangalle	Tammangalle Bisa	
2	Padang Timur	Paratia	
3	Sidorejo	Mitra Argo Kencana	
4	Amola	Anugrah	
5	Bakka-Bakka	Surya Darma	
6	Sugihwaras	Setia Karya Sejahtera	
7	Mirring	Gerakan Muda	
8	Sepporakki	Netral	
9	Tuttula	Tau Pia	
10	Rea	Rea Timur	
11	Mammi	Sikamasei	
12	Kaleok	Satu Hati	
13	Paku	Mandiri	
14	Battetangnga	Sipakarannu	
15	Kuajang	Gemilang	
16	Tonyaman	Amanah	
17	Kelapa Dua	Sejahtera Bersama	
18	Pappandangan	Lembah Hijau	
19	Duampanua	Harapan Baru	
20	Kunyi	Harapan Baru	
21	Patampanua	Usaha Bersama	
22	Barumbung	Karya Baru	
23	Pasiang	Sejahtera	
24	Tonrolima	Lalib	
25	Indu Makkombong	Semangat	
26	Bunga-Bunga	Karya Baru	
27	Rappang	Marandang	
28	Kurrak	Sipakatau	
29	Tapango Barat	Cahaya Bersinar	
30	Banato Rejo	Banato Mandiri	
31	Jambu Malea	Sabar Jaya	
32	Dakka	Sipatuo	
33	Tapango	Al-Ibrahim	
34	Batu	Bukit Pamung	
35	Kalimbua	Kada Situru	
36	Riso	Riso Mandiri	
37	Bumiayu	Mungi Rahayu	
38	Kebunsari	Gema Persada	
39	Nepo	Tunas Nepo	
40	Bumimulyo	Bumi Rahayu	
41	Galeso	Karang Taruna	
42	Arjosari	Sejahtera	

43	Banua Baru	Madani	
44	Tumpiling	Karya Muda	
45	Campurjo	Sehati	
46	Ugibaru	Assamaturusengae	
47	Rumpa	Mataram	
48	Beroangin	Sinar Harapan	
49	Landi Kanusuang	Tammakassing	
50	Sattoko	Berkah	
51	Bonne-Bonne	Marandang	
52	Buku	Sinar Buku	
53	Segerang	Segerang	
54	Bonra	Bonra	
55	Kurma	Muda Karya	
56	Bulo	Karya Bersama	
57	Karombang	Mesa Peolo	
58	Sabura	Mammesa Pau	
59	Pulliwa	Sinar Harapan	
60	Ihing	Matarrang	
61	Daala Timur	Bina Baru	
62	Pussui	Sipakainga	
63	Mapilli Barat	Assamalewuang	
64	Batupanga Daala	Usaha Bersama	
65	Puccadi	Tosalama	
66	Sambali Wali	Anugrah	
67	Tenggelang	Siasenga	
68	Katumbangan Lemo	Sipakalabbi	
69	Suruang	Panca Padu	
70	Lapeo	Abdi Amanah	
71	Botto	Bunga Padi	
72	Gattungang	Sejati	
73	Laliko	Sumber Rejeki	
74	Bonde	Asriraja	
75	Padang	Bukit Padang	
76	Parappe	Al-Khaerat	
77	Lampoko	Teduh Bersama	
78	Ongko	As-Suhuriah	
79	Lagi Agi	Jalluangan	
80	Kenje	Al-Sudan	
81	Sumarrang	Bambario	
82	Katumbangan	Salosso	
83	Tammajarra	Al-Ikhsan	
84	Lego	Sirannuang	
85	Mosso	Tosalama	
86	Bala	Al-Ikhsan	
87	Pallis	Siamasei	
88	Galung Tuluk	Sipakainga	

89	Sabang Subik	Makmur	
90	Pambusuang	Al-Mansur	
91	Lambanan	Sipatuo	
92	Tandassura	Tandassura	
93	Renggeang	Renggeang	
94	Tangan Baru	Tangan Baru	
95	Palece	Sibali Parri	
96	Lembang-Lembang	Gilir	
97	Samasundu	Uwai Tambar	
98	Salarri	Pembulang	
99	Napo	Todilaling	
100	Todang-Todang	Al-Basri	
101	Piriang Tapiko	Pilar	
102	Tubbi	Al-Ukhwuah	
103	Poda-Poda	Tallu Salu	
104	Besoangin	Jabal Nur	
105	Taramanu Tua	Lisung Adat	
106	Ambopadang	Harapan Baru	
107	Pollewani	Pollewani Indah	
108	Taloba	Al-Ihlas	
109	Arabua	Sisenga Sisalili	
110	Lilli	Usaha Reski	
111	Tapua	Harapan Baru	
112	Ba'ba Tapua	Sirannuang	
113	Rangoan	Sejahtera	
114	Mambu Tapua	Ketanika Menappi	
115	Katimbang	Katimbang Bersatu	
116	Sayoang	Gula Merah	
117	Saragian	Tomakaka	
118	Alu	Kaluku	
119	Mombi	Siasayangi	
120	Pao-Pao	Usaha Bersama	
121	Puppuuring	Sipakaraya	
122	Kalumammang	Mesa Ada	
123	Batulaya	Beru-Beru	
124	Tangnga-Tangnga	Baratan	
125	Karama	Taratajo	
126	Sepabatu	Siarioi	
127	Galung Lombok	Galung Lombok Bersatu	
128	Tandung	Siaras	
129	Lekopaddis	Al-Yusuf	
130	Padang Timur	Sibali Parri	
131	Katumbangan Lemo	Siarioi	
132	Lagi Agi	Mandiri	
133	Suruang	Lestari	
134	Parappe	Malaqbi	

135	Kenje	Gilang Gemilang	
136	Sumarrang	Tunas Jaya	
137	Lapeo	Cahaya Risqi	
138	Gattungang	Tipalayo	
139	Pussui Barat	Sipakaraya	
140	Luyo	Bannang Pute	
141	Besoangin Utara	Sipatuo	
142	Baru	Harapan Baru	
143	Patambanua	Patambanua Sejahtera	
144	Sumberjo	Sumber Rejeki	



Analisis Efisiensi Sumber Daya (Keuangan)

Untuk mencapai target sasaran tahun 2019, maka proses monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan secara ketat. Monev dilaksanakan setiap Triwulan, untuk memastikan Program dan Kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Program dan kegiatan dimaksud diantaranya :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas 11 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.530.703.000;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri atas 5 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.150.808.000;
3. Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah, terdiri atas 3 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.16.485.600;
4. Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri atas 2 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.8.031.000;
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri atas 2 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.17.301.400;
6. Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa dan Teknologi Tepat Guna, terdiri atas 2 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.215.004.000;
7. Program Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas 2 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.265.000.000;
8. Program Penataan Pemerintahan Desa, terdiri atas 2 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.350.000.000;
9. Program Bantuan Pembangunan Desa, terdiri atas 1 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.250.000.000;

DISTRIBUSI PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Sasaran 1 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	2 Program	Rp. 515.000.000
Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Program	Rp. 350.000.000
Sasaran 3 Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa	1 Program	Rp. 215.004.000

DATA HASIL EVALUASI ANGGARAN PROGRAM PADA APBD PERUBAHAN 2019

No	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	530.703.000	580.703.000	50.000.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	148.258.000	150.808.000	2.550.000
3	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	16.485.600	16.485.600	-
4	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.031.000	8.031.000	-
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.176.400	17.301.400	7.125.000
6	Program Peningkatan Usaha Ekonomi dan TTG	165.004.000	215.004.000	50.000.000
7	Program Pemberdayaan Masyarakat	235.000.000	265.000.000	30.000.000
8	Program Penataan Pemerintahan Desa	300.000.000	350.000.000	50.000.000
9	Program Bantuan Pembangunan Desa	250.000.000	250.000.000	-

Berdasarkan data di atas, terdapat penambahan anggaran sebesar **Rp. 1.644.604.500**. Penambahan ini dipengaruhi oleh beberapa kegiatan yang menjadi prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran diantaranya adalah :

1. Pembayaran Air dan Listrik
2. Rapat Konsultasi Keluar Daerah
3. Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4. Pengadaan Sidik Jari atau finger print
5. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
6. Penyediaan Makan Minum
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Alat Tulis Kantor
9. Kegiatan Pembinaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes
10. Kegiatan Expo Potensi Desa (Bumdesa)
11. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12. Kegiatan Pembinaan Tenaga Teknis dan Masyarakat
13. Kegiatan Pembinaan dan Gelar TTG
14. Kegiatan Pembangunan Desa MARASA

Adapun penambahan anggaran pada 14 kegiatan tersebut diatas bersumber dari hasil rasionalisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sendiri dan penambahan anggaran hasil usulan di APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

**DISTRIBUSI PENAMBAHAN ANGGARAN PADA SETIAP KEGIATAN PRIORITAS
APBD PERUBAHAN TAHUN 2019**

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU POKOK	PERUBAHAN	SELISIH TAMBAH KURANG
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Rp 84.995.000	Rp 73.099.000	Rp (11.896.000)
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	Rp 4.050.000	Rp 330.000	Rp (3.720.000)
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 66.700.000	Rp 70.898.900	Rp 4.198.900
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 17.004.000	Rp 25.000.300	Rp 7.996.300
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 10.000.000	Rp 9.040.000	Rp (960.000)
6	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Rp 10.500.000	Rp 11.670.000	Rp 1.170.000
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 40.000.000	Rp 46.868.800	Rp 6.868.800
8	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rp 161.400.000	Rp 211.400.000	Rp 50.000.000
9	Pengadaan Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya	Rp 24.512.000	Rp 24.512.000	Rp -
10	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Rp 10.176.400	Rp 13.801.400	Rp 3.625.000
11	Pemeliharaan Rutin berkala Perlengkapan gedung kantor	Rp 4.050.000	Rp 6.600.000	Rp 2.550.000
12	Pembinaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDes	Rp 150.000.000	Rp 200.000.000	Rp 50.000.000
13	Pembinaan Administrasi pemerintahan dan keuangan Desa	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	Rp -
14	Ekspo Potensi Desa (BUMDes)	Rp 62.500.000	Rp 77.500.000	Rp 15.000.000
15	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Rp 87.501.600	Rp 87.501.600	Rp -
16	Pembinaan Tenaga Teknis dan Masyarakat (KPMMD)	Rp 137.499.000	Rp 167.499.000	Rp 30.000.000
17	Pembinaan dan Gelar TTG	Rp 112.500.000	Rp 147.500.000	Rp 35.000.000
18	Pengadaan Mesin Sidik Jari		Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
19	Penyusunan Renstra	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp -
20	Program Bantuan Pembangunan Desa MARASA		Rp 250.000.000	
JUMLAH		Rp 1.143.388.000	Rp 1.586.721.000	Rp 193.333.000

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penggunaan sumberdaya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus pula disertai laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berikut ini akan disajikan serangkaian informasi keuangan tahun anggaran 2019.

1. JENIS BELANJA

Untuk Tahun 2019 Total Anggaran yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.3.694.568.956



1) Belanja Langsung

Adalah Anggaran Pembayaran Gaji Pokok dan Tunjangan Pegawai dengan Alokasi atau target Rp.1,891.235.956,- dengan realisasi Rp.1.866.535.221,- dengan capaian persentase sekitar 98%, sehingga terdapat Rp. 24.700.735,- yang tidak terlaksana disebabkan oleh adanya mutasi serta PNS yang pensiun dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2) Belanja Tidak Langsung

Adalah Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan dengan Alokasi atau target Rp. 1.803.333.000,- dengan realisasi Rp.1.798.980.266,- dengan capaian persentase 99,8%, sehingga terdapat Rp.4.352.734,- yang tidak terlaksana atau terealisasi.

2. REALISASI BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	PROGRAM	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	530.703.000	527.375.848	3.327.152
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	150.808.000	150.808.000	-
3	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	16.485.600	16.485.600	-
4	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.031.000	8.031.000	-
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17.301.000	16.975.000	326.000
6	Program Peningkatan Usaha Ekonomi dan TTG	215.004.000	214.744.140	259.860
7	Program Pemberdayaan Masyarakat	265.000.000	265.000.000	-
8	Program Penataan Pemerintahan Desa	350.000.000	350.000.000	-
9	Program Bantuan Pembangunan Desa	250.000.000	250.000.000	-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali mandar disusun dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *Good Governance*. laporan LAKIP ini juga memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Laporan LAKIP ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014-2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2019.

Menindaklanjuti berbagai kebijakan yang tertuang dalam Visi, Misi dan Sasaran Renstra, maka pada tahun 2019 telah ditetapkan 11 program dan 34 kegiatan agar program dan kegiatan tersebut mencapai sasaran yang telah ditetapkan, telah pula ditetapkan 7 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari 7 indikator yang ditetapkan, secara umum dapat dinyatakan telah dicapai dengan baik. Dengan kategori capaian sebagai berikut 7 indikator dengan capaian kinerja 100%.

Sejumlah kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPMD tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

- a. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b. Ketersediaan data yang valid dari bidang-bidang selaku penunjang keberhasilan penyusunan LAKIP kurang mendukung

Meskipun demikian, laporan ini dapat disusun sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan, serta disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut pada tingkat atasan. Jika dalam sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut pada tingkat atasan. Jika dalam penyusunan LAKIP ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

dan saran dari berbagai pihak tetap diharapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan di masa yang akan datang.

Polewali, 19 Februari 2020
Kepala DPMD,

H. AZWAR JASIN, S.Sos.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19730711 199203 1 001